

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengenai fenomena perumahan dan permukiman kumuh, maka di butuhkan keterlibatan pemerintah didalam nya. Dalam keterlibatan pemerintah yaitu dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk didalam nya upaya dalam peningkatan peran pemerintah yang dapat menggerakan partisipasi dari masyarakat. Harapan nya agar dapat mengikutsertakan semua kelompok kehidupan ataupun individu masyarakat dalam kelompok kehidupan bermasyarakat dan dapat membantu memberdayakan mereka.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi sebagai tempat hunian.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang

selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,” bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut.

Pertengahan Tahun 2016 PNPM berubah menjadi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yang menekankan pada infrastruktur. Kehidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara Indonesia, maka dari itu tujuan dari penghidupan yang layak adalah sebagai penunjang bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang berkeseluruhan yang terpadu dan terarah, termasuk pembangunan pada daerah-daerah yang kurang tertata. (sumber: partisipasi masyarakat dalam implementasi program KOTAKU/PNPM di kecamatan ciawi, dalam (rohmat dkk 2017).

Menangani permasalahan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Program yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 Kabupaten/Kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Yang menjadi basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya manusia maupun sumber pendanaan Kabupaten/Kota melalui Bank Dunia, Islamic Development Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan demi mencapai target

peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. (Sumber: kotaku.pu.go.id/05/mei/2020/8:24.4)

Pada tahun 2019 bertambah menjadi 87.000 Ha permukiman kumuh dan pada tahun 2020 masih terdapat 55.000 Ha³ permukiman kumuh yang belum di tuntas kan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang sesuai dari hasil penghitungan dan pengurangan dari luasan pemukiman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut akan di perkirakan terus bertambah apa bila tidak ada penanganan yang inovatif, menyeluruh dan tepat pada sasaran. Tujuan dari program Kotaku ini merupakan untuk meningkatkan akses terhadap insfrastrustur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan yang mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni.

(Sumber:<http://cnnindonesia.com/04/09/2019/05:35.4>)

KOTAKU ini di harap kan menjadi suatu platform kolaborasi yang dapat mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 55.000 Ha, dan pada saat ini pihaknya telah mengentaskan Kawasan kumuh seluas 32.000 Ha yang di targetkan pada tahun 2020, yang dilakukan secara bertahap di Indonesia yaitu melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan dan perencanaan perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang ada pada tingkat dasar maupun di tingkat kota dan desa serta pendampingan teknik untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu Program KOTAKU. (Sumber: <http://cnnindonesia.com/04/09/2019/05:35.4>)

Menangani permasalahan tentang pemukiman di wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berperan dalam menangani Kawasan kumuh dengan melakukan suatu penataan lingkungan ataupun penyediaan rumah untuk layak huni. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Dalam arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah pembangunan sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program KOTAKU akan menangani perumahan kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. (Sumber: kotaku.pu.go.id/05/mei/20208:29.4)

Sehingga untuk mewujudkan keberhasilan dari Program KOTAKU di butuhkan kesadaran dan partisipasi yang aktif dari masyarakat setempat untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program selain itu juga di perlukan kebijakan dari pihak pemerintah untuk dapat mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk Bersama-sama dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program kotaku.

Cohen dan Uphoff (dalam Mohammad Mulyadi 2019:25) memberikan rumusan “partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai: (1) partisipasi pengambilan keputusan (2) partisipasi pelaksanaan (3) partisipasi kemanfaatan dan (4) partisipasi Evaluasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu program pemerintah dan program dari KOTAKU ini dilihat dari kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Berdasarkan ungkapan pemegang kesekretariatan KOTAKU Desa Burujul Wetan salah satu daerah yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Program KOTAKU berdasarkan SK (Surat Keputusan) kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing Kabupaten/Kota, untuk itu maka dibentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) agar terciptanya sinergitas dengan pemerintah dan lainnya. Program Kotaku dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat kesadaran dari masyarakat setempat untuk dapat bekerjasama dan bergotong royong. Dalam pelaksanaan Program KOTAKU tidak terlepas dari suatu permasalahan terutama mengenai partisipasi masyarakat yang ada di daerah itu sendiri, karena Program KOTAKU tersebut secara penuh dari mulai pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi dilaksanakan oleh masyarakatnya. Permasalahan kurang optimalnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dapat dilihat dari kurangnya untuk ikut berkontribusi secara langsung baik itu tenaga atau pun materi dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh, serta masih kurangnya masyarakat dalam partisipasi di Desa Burujul Wetan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan apa saja yang menjadikan faktor pendorong dan faktor penghambat dari Program KOTAKU.

Karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam mencapai suatu keberhasilan dan keberlanjutan dari Program KOTAKU..

Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian mengenai **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis selanjutnya disusun rumusan masalah sebagai berikut Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka) belum berjalan secara optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ?
4. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Burujul Wetan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat berjalannya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harap kan memiliki manfaat, baik bagi pihak penulis maupun bagi pengemban ilmu dan pengetahuan secara akademik. Secara lebih rinci penelitian ini juga di harap kan dapat memberi manfaat bagi :

1.5.1 Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah wawasan teorik bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
- b. Penelitian ini juga semoga dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis :

- a. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam hal ini Kementerian Perumahan dan permukiman untuk menjalankan program perbaikan infrastruktur khususnya pencegahan permukiman kumuh.
- b. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Serta fasilitas pelayanan seperti jalan berlubang, drainase, dan pengelolaan sampah yang masih kurang baik karena masih ada sebagian warga yang mengeluhkan perihal pengelolaan sampah di Desa Burujul Wetan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kota Tanpa Kumuh merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak . (Sumber: <http://cnnindonesia.com/04/09/2019/05:35.4>)

Dalam kegiatan pembangunan terhadap partisipasi masyarakat merupakan suatu perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Partisipasi juga merupakan suatu gejala demokrasi dimana setiap orang ikut serta dan bertanggung jawab sesuai dengan kematangan dan tingkat kewajibannya.

Partisipasi dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu perihal turut berperan serta didalam suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Alastari White (dalam Santoso Sastropetro 1986:32) “Partisipasi merupakan keterlibatan penduduk setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan proyek atau pelaksanaannya”.

Sedangkan menurut Adisasmita (dalam Moch. Solekhan. 2014:141) “Partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang di kerjakan di masyarakat lokal.”

Cohen dan Uphoff (dalam Mohammad Mulyadi 2019:25) “memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi kemanfaatan, partisipasi pelaksanaan, dan partisipasi evaluasi. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang nyata terjadi di masyarakat, untuk itu Cohen dan Uphoff merumuskan partisipasi masyarakat sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam perumusan/proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat/saran menilai suatu program/kebijakan yang akan diterapkan.
2. Partisipasi pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat terwujud kontribusi. Menurut Mubyarto Kartodirdjo (dalam (Mohammad Mulyadi 2019:32) : “Kontribusi dapat di ketahui dari kesediaan masyarakat memberikan dukungan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri”.
3. Partisipasi kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Partisipasi evaluasi, merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan.

Sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program KOTAKU merupakan faktor utama yang dapat menentukan suatu keberhasilan dari Program Kota Tanpa Kumuh tersebut.

Menurut Rusidi (dalam Moch Solekhan 2014:152) “ mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi yang terdiri dari :

1. Sumbangan pemikiran atau ide dan gagasan,
2. Sumbangan materi atau dana, barang, alat,
3. Sumbangan tenaga atau bekerja,
4. memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan

Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi dan (2) pembangunan. yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya di definisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Sondang P Siagian (2018:4)

Sedangkan Menurut Ginjar (dalam Anggara, Sumantri 2016:86) “pendekatan yang tepat untuk membahas administrasi bagi pembangunan adalah pendekatan manajemen.”

Studi mengenai manajemen telah banyak mengilhami perkembangan. Akan tetapi, teori pokoknya tidak berubah. Teori pokok tersebut menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen pada sistem administrasi di berbagai negara, baik pada negara yang sedang membangun maupun di negara maju sama saja, yang berbeda adalah penekanannya. Perbedaan teknik atau metode penyelenggaraannya juga bergantung pada pengaruh berbagai faktor seperti, sistem politik latar belakang

budaya, atau tingkat penguasaan teknologi. Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas. Demikian pula, administrasi pembangunan adalah administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Untuk analisi manajemen pembangunan terbagi menjadi beberapa fungsi yang cukup nyata.

Menurut Ginanjar (dalam Anggara, Sumantri 2016:86) merinci delapan fungsi tersebut yaitu :

1. Perencanaan
2. Pengerahan (mobilisasi) sumber daya
3. Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat
4. Penganggaran
5. Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah
6. Pengoordinasian
7. Pemantauan dan peng-evaluasian
8. Pengawasan

Disisi lain, partisipasi penting bagi pembangunan, bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu terlibatnya serta tergeraknya seluruh masyarakat didalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arahan dan strategis yang sudah ditetapkan melalui bentuk partisipasi masyarakat, dari pihak lain juga proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi masyarakat.

Misalnya, dengan adanya pembangunan di harap kan menjadi perluasaan kesempatan kerja, kesedian dan kemampuan bekerja anggota masyarakat di dalam nya.

Menurut Mohammad Mulyadi (2019:14) Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.

Pembangunan pada hakikat nya merupakan proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, maka dalam perubahan tersebut sangat di tentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah partisipasi dari masyarakat atau sumber daya manusia nya sendiri

Sehingga dalam suatu proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan. Maka dari itu partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam suatu kegiatan pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintahan Desa setempat, dan dengan adanya gotongroyong serta kesadaran dari masyarakat, pembangunan atau kegiatan sosial lainnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan pada tahap awal.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :



1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi konsep penelitian

- a. Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan atau moral/perasaan didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
- b. Masyarakat merupakan sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan (habitat), tradisi, sikap dan juga perasaan persatuan yang sama, masyarakat juga sebagai pelaku pembangunan, tanpa kesadaran, minat dan partisipasi masyarakat, maka proses pembangunan akan sulit untuk dijalankan.
- c. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu mekanisme program dari kementerian untuk menanggulangi permukiman yang kumuh dan fasilitas lainnya yang di desa yang menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh.
- d. Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka adalah salah satu desa diantara 16 yang ada di Kecamatan Jatiwangi.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Dalam definisi operasional konsep ini dapat memudahkan terhadap pengarahannya pembahasan serta mendapatkan pengertian, maka dari itu penulis membatasi definisi operasional konsep sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Operasional konsep penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff 1977:99 (dalam Mohammad Mulyadi 2019:25)	1. Partisipasi pengambilan keputusan	1. Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan ide atau gagasan. 2. Ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
	2. Partisipasi pelaksanaan	1. Menyumbang dana 2. Berpartisipasi tenaga
	3. Partisipasi kemanfaatan	1. Memberikan manfaat kepada masyarakat hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh

		2. Pengetahuan masyarakat tentang Program KOTAKU
	4. Partisipasi evaluasi	1. Monitoring pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan 2. Evaluasi terhadap masalah-masalah yang timbul

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang di gunakan

Metode penelitian (menurut Sugiyono 2017:2) merupakan cara alamiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan Sistematis artinya, prosese yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian yang berdasarkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dengan demikian data yang terkumpul merupakan kata-kata dan gambar, bukan angka-angka walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang saja.

Metode penelitian Kualitatif menurut Borg and Gall (dalam Sugiyono 2017:9) “Metode penelitian adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.”

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu, karena penelitian yang di gunakan bukan mencari suatu hubungan antar variabel, akan tetapi penelitian ini dilakukan untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang objek penelitian yaitu tentang “Partisipasi Masyarakat terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Majalengka (Studi kasus di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi).”

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Sampel atau informan yang dilibatkan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Teknik dalam pengambilan inform yaitu dengan cara *Purposive Sampling* artinya dalam pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.2.1 Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Dan informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ketua beserta anggota pelaksana Program KOTAKU Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

1.8.2.2 Informan Pendukung

Informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan kunci. Untuk informan pendukung di Desa Burujul Wetan sendiri yaitu masyarakat Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti yang diperlukan penulis untuk bahan referensi dan acuan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan dua teknik yaitu :

- 1) Wawancara, dimana wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya Jawab secara langsung dengan Informan dan Key Informan.
- 2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

- 1) Data primer adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan metode wawancara kepada informan.
- 2) Sedangkan data sekunder yaitu mencari data, dengan cara mencari data-data yang tersedia dan yang di perlukan oleh peneliti sebagai referensi dan bahan acuan untuk berlangsungnya penelitian.

Misalnya bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur yang di butuhkan penulis.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan

Menurut Sugiyono (2001:270) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (Validitas Interval), *Transferability* (Validitas Eksternal), *dependability* (Reabilitas), *confirmability* (Objektivitas).

Untuk menghindari adanya penelitian yang biasa, maka dari itu di perlukan pengujian keabsahan data. Dan keabsahan data dapat dibuktikan melalui penelitian sehingga data tersebut dapat di pertanggungjawab kan.

Penulis juga menggunakan teknik Triangulasi dalam menguji keabsahan data yaitu dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi waktu dan data.

Adapun peneliti melakukan kredibilitas data dengan teknik triangulasi ini dapat menghilangkan dari beberapa perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks atau studi sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan yang berbeda.

Cara-cara yang dilakukan dalam teknik Triangulasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil data pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara dengan para informan.
- b. Membandingkan antara apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dengan hasil data wawancara orang secara pribadi.
- c. Dan yang terakhir yaitu membandingkan antara hasil dari wawancara dengan suatu dokumen yang saling berkaitan.

Dalam pengecekan data dilakukan bahwa data yang didapat adalah data yang valid serta akurat sehingga dilakukan validasi data dengan teknik yaitu triangulasi dengan mengajukan suatu pernyataan yang sama dengan informan dan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara secara pribadi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif , artinya suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada suatu objek yang diteliti, dan menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilaksanakan. kemudian data yang telah diperoleh di analisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan suatu keterangan tambahan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.91 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka 45454 Jawa Barat. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah :

- a. Terdapat suatu masalah didalam Program Kotaku di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- b. Informasi serta data yang mudah untuk di dapat
- c. Serta lokasi penelitian terjangkau

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat selesai secepatnya dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2020 penelitian ini di buat dan layak untuk melanjutkan penulisan skripsi. Bentuk kegiatan yang akan di lakukan dalam waktu tujuh bulan adalah

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]